



Instrumen Akuntabilitas Guru BK dalam Menyelenggarakan Layanan Dasar (Guidance Curriculum)

Aip Badrujaman Rosyidin ✉ dan Suherman

Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 14 Agustus 2018
Disetujui 21 Agustus 2018
Dipublikasikan 30 September 2018

Keywords:

accountability; curriculum guidance; instrument

Abstrak

Pengukuran terhadap akuntabilitas merupakan isu penting, dan menjadi kajian yang mendukung profesionalitas profesi BK. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen akuntabilitas guru BK dalam menyelenggarakan layanan dasar yang menggunakan skala kombinasi mixed standard scale for evaluating student behavior dan skala direct behavior rating. Pengembangan instrumen dilakukan melalui kegiatan penelitian yang bersifat research and development melalui 6 tahapan, yaitu; preliminary study, konstruksi instrumen, penilaian pakar, perbaikan berdasarkan masukan pakar, validasi empirik, administrasi instrumen akhir. Konstruksi instrumen akuntabilitas terdiri dari 5 indikator yaitu; mampu menerima tanggungjawab, melakukan komunikasi, menjelaskan layanan, menetapkan mekanisme umpan balik, serta melakukan perbaikan layanan. Luaran Penelitian ini adalah instrumen akuntabilitas yang terdiri dari 3 bagian, meliputi; instrumen siswa, wali kelas, dan kepala sekolah. Proses validasi dilakukan baik secara konseptual melalui penilaian ahli, serta empirik melalui ujicoba pada subjek ukur yang terdiri dari: 1008 siswa, 33 wali kelas, dan 33 kepala sekolah. Validasi ahli dilakukan pada ahli manajemen pendidikan, manajemen, dan bimbingan dan konseling. Instrumen akuntabilitas yang diisi oleh kepala sekolah terdiri dari 38 butir dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,96. Instrumen akuntabilitas yang diisi oleh wali kelas berjumlah 12 butir dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,90. Instrumen akuntabilitas yang diisi oleh siswa berjumlah 28 butir dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,85.

Abstract

Accountability is an important issue in the guidance and counseling profession. This study aimed to develop an instrument for measuring accountability of guidance and counseling teachers in conducting guidance curriculum which used a mixed standard scale for evaluating student behavior and direct behavior rating as a scale. The instrument is developed through research and development study which consists of six phases: preliminary study, instrument construction, expert judgement, improvement, empirical validation, improvement and instrument administration. The construct of accountability instrument consists of five components: take responsibilities, communicate the services, explain the services, have a feedback mechanism, and conduct improvement for the stakeholder. Accountability scale of school counselor in conducting guidance curriculum consists of three version, fill by students, teachers, and school principals. Three experts have reviewed the instrument construct. Empirical validation was also conducted to 1008 students, 33 teachers, and 33 principals. The instrument of accountability that is filled by the head teachers consists of 38 items with reliability coefficient of 0.96. The instrument of accountability that is filled by the teachers consists of 12 items with reliability coefficient of 0.90. Accountability instrument which is filled by students totals 28 items with reliability coefficient of 0.85.

How to cite: Rosyidin, Aip Badrujaman, Suherman. (2018). Instrumen Akuntabilitas Guru BK dalam Menyelenggarakan Layanan Dasar (Guidance Curriculum). *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory And Application*, 7(3), 8-13.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Akuntabilitas program bimbingan dan konseling merupakan suatu topik penting dalam pembahasan mengenai program bimbingan dan konseling di sekolah. Diskusi mengenai akuntabilitas program bimbingan dan konseling sebagaimana yang telah dicatat oleh Dahir dan Stone (2009) telah terjadi lebih dari 25 tahun (lihat juga Isaac, 2003). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Gysbers (2003) yang menyatakan bahwa isu akuntabilitas adalah isu hangat dalam dialog profesional.

Pada era sekarang ini, akuntabilitas tidak lagi menjadi isu, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Diltz dan Mason (2010) sependapat dengan para ahli seperti Housley, Mc Daniel, Nims, James, Hughey yang menyatakan bahwa konselor diminta untuk terlibat dalam praktik akuntabilitas yang memberikan dukungan efektifitas program BK di sekolah. Memperkuat pendapat Diltz dan Mason, Stanbergeer dan Smith (1996) mencatat adanya peningkatan tuntutan akuntabilitas terhadap program konseling. Hal senada juga diungkapkan oleh White (2007) mengutip pendapat Studer yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tuntutan bagi pendidik termasuk juga konselor untuk efektifitas dari program yang diselenggarakannya. Bahkan Gysbers (2003) menyebutkan bahwa akuntabilitas bukan hanya sebuah tuntutan akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan bagi konselor. Akuntabilitas merupakan kondisi yang harus dipantau secara berkelanjutan.

Akuntabilitas dimaknai beragam oleh para ahli. Sebagian ahli mengartikan akuntabilitas sebagai kegiatan evaluasi program BK (Gysbers, 2003; Dimmit, 2009). Meskipun antara akuntabilitas dan evaluasi memiliki hubungan yang sangat erat, akan tetapi dua istilah tersebut memiliki perbedaan. Badrujaman (2011) mengungkapkan bahwa istilah akuntabilitas merujuk kepada keadaan dimana pengelola program mampu menjelaskan proses pelaksanaan, serta hasil yang dicapai dalam program yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas merujuk kepada tingkat kepercayaan stakeholder kepada program yang menjadi tujuan dilaksanakannya evaluasi program bimbingan dan konseling. Sejalan dengan pendapat Badrujaman, Astramovich (2007) berpendapat bahwa akuntabilitas program tidak sama dengan evaluasi program. Astramovich menjelas-

kan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang terjadi akibat dari adanya evaluasi program bimbingan dan konseling. Untuk itu, maka evaluasi program seharusnya dapat menjadi jembatan untuk sampai pada kondisi yang akuntabel.

Myrick (2003) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu keadaan dimana penyelenggara program (dalam hal ini guru BK) bertanggungjawab pada apa yang dilakukan dan kontribusi yang diberikan, terutama berkaitan dengan tujuan program, prosedur, dan hasil yang dicapai. Tanggungjawab terhadap program bimbingan dan konseling yang diselenggarakan dapat berbentuk dokumentasi efektifitas program.

Pendapat ini senada dengan pendapat Stone & Dahir (2009) yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemampuan untuk menyediakan dokumentasi dari efektifitas hasil kegiatan profesional. ASCA menegaskan bahwa akuntabilitas sekarang ini menekankan pengumpulan baseline data, serta data efektifitas program BK (Diltz & Mason, 2010). Dengan kata lain, konselor sekolah harus mendemonstrasikan bagaimanakah dampak program pada setiap siswa, dan dampak program pada agenda perbaikan sekolah.

Sink (2009) mengungkapkan bahwa mendemonstrasikan akuntabilitas membantu meyakinkan siswa, orangtua, guru, administrator, dan masyarakat umum akan manfaat yang terus didapat dari kualitas program BK komprehensif. White (2007) mengungkapkan bahwa konselor perlu membagi informasi mengenai akuntabilitas. Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Diltz dan Mason (2010) yang menjelaskan bahwa konselor penting membagi informasi mengenai akuntabilitas program BK pada stakeholder. Kedua pendapat diatas diperkuat oleh pernyataan Dahir & Stone (2009) yang mengatakan bahwa pengumpulan data dan pemberian informasi terhadap data pada stakeholder merupakan kunci dari kekuatan profesi konselor.

Loesch dan Ritchie (White, 2007) mengungkapkan bahwa stakeholder adalah orang yang berkepentingan dalam efektifitas program konseling di sekolah. Lebih lanjut, White (2007) menyebutkan stakeholder yaitu; orangtua, kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah, masyarakat, dunia industry, media, pemerintah, siswa, serta konselor.

White (2007) menjelaskan bahwa informasi yang diberikan kepada stakeholder tersebut dapat berupa outcome yang ingin dicapai

seperti prestasi, kehadiran, ingatan, kelulusan, keamanan, dan keinginan melanjutkan studi. Meskipun informasi tersebut dapat diberikan, akan tetapi pemberian informasi mengenai akuntabilitas harus sesuai dengan ketertarikan dan kebutuhan dari masing-masing stakeholder. Lebih lanjut, Sink (2009) mengungkapkan perlu ada keselarasan data antara laporan mengenai akuntabilitas kepada stakeholder utama. Untuk itu, maka perlu ada format laporan yang dikembangkan.

Berdasarkan kajian teoritik yang dilakukan, dapat diidentifikasi lima (5) indikator akuntabilitas, meliputi; (1) dapat menerima tanggungjawab (Bavly dalam Wood Jr. & Winston, 2005; Connors et al. (Wood Jr. & Winston, 2005), (2) terbangunnya komunikasi antara pengelola program dengan stakeholdernya (Levinson, 2011; Woods Jr. & Winston, 2005), (3) adanya penjelasan kepada stakeholder mengenai layanan yang diselenggarakan. (ECDB, 2006; Woods Jr & Winston, 2005; Levinson, 2011; Ryan, 2005; Myrick, 2003; White, 2007; Wang, 2010), (4) adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukannya pada pengelola program. (ECDB, 2006; Ryan, 2005), dan (5) adanya perbaikan program secara berkelanjutan. (ECDB, 2006; Stanbergeer & Smith, 1996).

Program bimbingan dan konseling merupakan program besar yang didalamnya terdapat layanan. Oleh karena itu, pengembangan instrumen difokuskan pada akuntabilitas layanan dasar (guidance curriculum) sebagai layanan yang lebih didasarkan intervensi pedagogik yang menjadi ke-khasan BK di Indonesia. Pengukuran terhadap akuntabilitas layanan dasar menjadi sangat penting dalam rangka peningkatan penyelenggaraan layanan BK di sekolah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menghasilkan instrumen akuntabilitas layanan dasar (guidance curriculum).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan instrumen akuntabilitas guru bimbingan dan konseling yang menyelenggarakan layanan dasar, dimana proses pengembangan instrumen terdiri dari enam tahapan dengan subjek penelitian yang beragam, meliputi; preliminary study, konstruksi instrumen, penilaian ahli, perbaikan berdasarkan ahli, validasi empirik, perbaikan dan instrumen akhir.

Preliminary study dilakukan dalam

rangka mengetahui kecenderungan guru BK dalam menggunakan instrumen akuntabilitas dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion terhadap 10 orang guru BK. Berdasarkan FGD yang telah dilakukan, diketahui bahwa guru BK tidak terlalu mengetahui tentang akuntabilitas. Sehingga mereka tidak pernah menggunakan instrumen akuntabilitas dalam bentuk apapun untuk mengetahui akuntabilitas mereka dalam menyelenggarakan layanan dasar. Harapan mereka apabila dikembangkan instrumen akuntabilitas, dapat digunakan di sekolah. Hasil lain dari preliminary study adalah informasi mengenai keterlaksanaan evaluasi layanan dasar pada 10 SMP Negeri di Jakarta Timur. adalah 0,42%.

Setelah mendapat gambaran mengenai kecenderungan guru BK dalam pengukuran akuntabilitas dan tingkat akuntabilitas, kemudian peneliti melakukan konstruksi instrumen akuntabilitas, mulai dari kisi-kisi sampai dengan butir.

Validasi konstruk penilaian isi (content) instrumen dilakukan melalui validasi ahli. Subjeknya adalah pakar bimbingan dan konseling dan pakar manajemen pendidikan berjumlah tiga orang, yaitu; Prof. Dr. Juntika, M.Pd., Dr. Haryo Kuncoro, MM., Prof. Dr. Ruqaiyah, M.Pd. Validasi konstruk isi dilakukan untuk mengetahui kualitas konstruk dari instrumen yang dikembangkan. Validasi konstruk dilakukan melalui penilaian ahli. Skala yang digunakan dalam penilaian ahli adalah skala semantic diferensial dengan rentang 1 sampai dengan 9. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis median dengan kriteria median 1 sampai 3 berarti ditolak, median 4 sampai 6 dapat diperbaiki, median 7 sampai 9 dapat diterima

Pada tahap validasi empirik subjek penelitian adalah siswa yang berjumlah 1008, guru mata pelajaran berjumlah 33 orang, dan kepala sekolah berjumlah 33 orang di Jakarta Timur.

Validasi empirik skala akuntabilitas layanan dasar terdiri atas dua kegiatan. Pertama adalah pengujian empirik pertama adalah validitas butir instrumen. Validitas butir dilakukan untuk meyakinkan bahwa butir mendukung skor totalnya. Pengujian validitas butir dilakukan dengan teknik korelasi menggunakan rumus product moment pearson.

Pengujian yang kedua adalah pengujian reliabilitas. Reliabilitas merupakan konsep yang menerangkan kualitas suatu instrumen secara keseluruhan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik konsistensi internal.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen akuntabilitas Layanan Dasar

KOMPONEN	Indikator	Stakeholder yang berkepentingan
Menerima tanggung-jawab	Menghadapi masalah	Kepala sekolah/siswa
	Menghadapi tantangan	Kepala sekolah/siswa
	Mengakui kekurangan program	Kepala sekolah
Melakukan komunikasi	Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam menetapkan tujuan program	Kepala sekolah/guru/siswa
	Melakukan konsultasi dalam proses pelaksanaan	Kepala sekolah
Menjelaskan program	Menyampaikan Silabus bimbingan	Kepala sekolah
	Menyampaikan satuan layanan/ RPP yang digunakan dalam layanan dasar	Kepala sekolah
	Memberikan informasi mengenai hasil yang dicapai	Kepala sekolah/guru/siswa
Memiliki mekanisme umpan balik	Adanya mekanisme menyampaikan masukan	Kepala sekolah/guru/siswa
	Terdapat cara menyampaikan keluhan	Kepala sekolah/guru/siswa
Adanya perbaikan program	Adanya perbaikan pada program	Kepala sekolah, guru
	Terdapat peningkatan kompetensi/tujuan program	Siswa

diketahui koefisien reliabilitas sebesar 0,85. Koefisien reliabilitas tergolong sangat tinggi dan layak digunakan dalam penelitian (Arikunto, 2003).

PEMBAHASAN

Instrumen akuntabilitas yang menggunakan skala kombinasi Mixed Standard Scale for Evaluating Student dan direct behavior rating dihasilkan dalam penelitian ini berada pada kategori sangat baik. Ini tampak pada koefisien reliabilitas instrumen yang berada di atas 0,80. Hasil penelitian ini, meyakinkan bahwa skala kombinasi yang digunakan memiliki kualitas yang sama baiknya dengan instrumen akuntabilitas yang dikembangkan ahli lainnya dengan menggunakan skala likert. Poole (2000) mengembangkan program accountability quality scale (PAQS) yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas program pada lembaga yang non-profit. Skala ini terdiri atas 34 butir instrumen yang mengukur 7 indikator dari akuntabilitas. Instrumen lain yang telah dikembangkan adalah administrative accountability scale yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas terkait dengan administrasi sua-

tu kota (Stapleton & Owen, 2011).

Keberadaan instrumen akuntabilitas guru BK dalam melaksanakan layanan dasar merupakan suatu kebutuhan dalam rangka peningkatan akuntabilitas guru BK dalam pandangan stakeholder. Akuntabilitas menjadi tidak terhindarkan untuk dihadirkan pada setiap layanan publik yang diselenggarakan termasuk pendidikan khususnya bimbingan dan konseling. Masyarakat, apakah orangtua, kepala sekolah, bahkan siswa, semakin kritis dan mengajukan banyak pertanyaan terhadap guru BK dalam penyelenggaraan layanan BK termasuk layanan dasar. Untuk itu, guru BK mesti siap menjawab pertanyaan tersebut yang didasarkan pada praktik akuntabilitas yang dilakukannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa instrumen akuntabilitas guru BK dalam menyelenggarakan layanan dasar terdiri dari 5 indikator yaitu; mampu menerima tanggungjawab, melakukan komunikasi, menjelaskan, menetapkan mekanisme umpan balik, serta melakukan perbaikan

program bagi stakeholder. Instrumen akuntabilitas terdiri dari 3 sub instrumen, meliputi; instrumen yang diisi oleh kepala sekolah, wali kelas, dan siswa. Kualitas instrumen tergolong sangat baik yang ditunjukkan melalui koefisien reliabilitas antara 0,85 sampai dengan 0,90

Berdasarkan kesimpulan yang telah diajukan, diajukan beberapa saran terutama bagi penelitian lanjutan. Konstruksi instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini belum menggunakan analisis faktor yang dapat mendeteksi kerekatan butir pada indikator yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji apakah butir memiliki kerekatan dengan indikator.

Bagi konselor sekolah, disarankan untuk membangun kesadaran untuk memperhatikan praktik akuntabilitas yang dilakukannya diawali dengan keberanian untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat akuntabilitasnya dalam pandangan stakeholdernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrujaman, Aip. 2011. *Teori dan Aplikasi Evaluasi program Bimbingan Konseling*. Jakarta: Indeks.
- Dimmitt, Carey. 2009. Why Evaluation Matters: Determining Effective School Counseling Practices. *Profesional School Counseling*. August. vol.12, 6.
- Dimmitt, Carey. 2010. Evaluation in School Counseling: Current Practices and Future Possibilities. <http://cor.sagepub.com>. Didownload pada tanggal 3 Juli 2010
- Dahir, Carol A & Carrolyn B Stone. 2009. School Counselor Accountability: The Path to Social Justice and Systemic Change. *Journal of Counseling & Development*. Winter, vol.87, 12.
- ECB2. 2006. *Panduan 'Cukup Baik' Guna Pengukuran Dampak Dan Akuntabilitas Untuk Situasi Darurat*.
- Gysbers, Norman C. 2004. Comprehensive Guidance and Counseling Programs: The Evolution of Accountability. *Profesional School Counseling*. October. vol.8, 1.
- Jeannine R Studer, Aaron H Oberman, Reagan H Womack. Producing Evidence to Show Counseling Effectiveness in the Schools. *Profesional School Counseling*. Alexandria: Jun 2006. Vol.9, Iss. 5; pg. 385, 7 pgs
- Jeannine R Studer, Aaron Oberman. Supervision ini ASCA Models. *Profesional School Counseling*. Alexandria: Oct 2006. Vol. 10, Iss. 1; pg. 82, 6 pgs
- Levinson. 2011. Democracy, accountability, and education. *Theory and research in education*. Vol.9,2.
- Perera-Diltz, Dilani M & Mason, Kimberly L. 2010. An Exploration of Accountability Practices of School Counselors: A National Study. *Journal of Profesional counseling, Practice, Theory, and Research*. Summer/Spring. Vol. 38, 52.
- Poole, Dennis L. 2000. Evaluating performance measurement system in non-profit agencies: the program accountability quality scale (PAQS). *American Journal of evaluation*. Vol.21, 1.
- Ryan, Katherine. 2005. Making educational accountability more democratic. *American Journal of evaluation*. December. vol.26, 4.
- Sink, Christopher. 2009. School Counselor as Accountability Leaders: Another Call for Action. *Profesional School Counseling*. December. vol.13, 2.
- Stapleton, Karyn and Owen Hargie. 2011. Double-Bind Accountability Dilemmas: Impression Management and Accountability Strategies Used by Senior Banking Executives. *Journal of Language and Social Psychology*. May Vol.30,
- Steenbarger, Brett N & H Bret Smith. 1996. Assessing the Quality of Counseling Services: Developing Accountabel Helping System. *Journal of Counseling & Development*. Nov/Dec, vol.75, 145.
- Wang, Xiaohu. 2002. Assessing administrative accountability: result from national survey. *The American review of public administration*. September, vol.32, 3.
- Whiston, Susan C. 1996. Accountability Through Action Research: Research Methods for Practitioners. *Journal of Counseling & Development*. Jul/Aug, vol.74, 616.
- White, France A. 2007. The Profesional School Counselor's Chalange: Accountability. *Journal of Profesional counseling, Practice, Theory, and Research*. Spring. Vol. 35, 62.